

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebagai Upaya Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Perhutani Probolinggo

Gyska Indah Harya¹, Salsabila Arysca Dara², Mochammad Wisnu Wachidan³, Zaidan Akmal Athillah⁴, Daniel Ivandha Putra Wibowo⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Kota Surabaya

e-mail: gyskaharya.agribis@upnjatim.ac.id

Abstrak

Program PHBM merupakan sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dijalankan Perhutani KPH Probolinggo bersama masyarakat desa hutan untuk memaksimalkan manfaatnya dalam mencapai kepentingan bersama. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengidentifikasi pelaksanaan program PHBM yang dilaksanakan oleh Perhutani dengan masyarakat desa hutan dan mengidentifikasi upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan oleh Perhutani. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berbentuk data primer dan data sekunder. Hasil yang didapatkan bahwa program PHBM dapat memberikan keuntungan bagi Perhutani sebab masyarakat sekitar hutan dapat terlibat langsung dalam menjaga sumberdaya hutan serta membantu Perhutani KPH Probolinggo dalam mencegah dan memberantas perusakan hutan secara ilegal. Upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan Perhutani KPH Probolinggo melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif melibatkan patroli rutin dan deteksi dini, sedangkan tindakan represif melibatkan kerjasama dengan polisi dan penegak hukum daerah setempat.

Kata kunci: *PHBM, LMDH, Pencegahan, Pemberantasan, Perhutani*

Abstract

The PHBM program is a forest resource management system carried out by Perhutani KPH Probolinggo with forest village communities to maximize its benefits in achieving common interests. The purpose of writing this journal is to identify the implementation of the PHBM program implemented by Perhutani with forest village communities and identify efforts to prevent and eradicate forest destruction by Perhutani. The method used in this journal is a qualitative descriptive method. The data collected is in the form of primary data and secondary data. The results obtained show that the PHBM program can provide benefits for Perhutani because communities around the forest can be directly involved in protecting forest resources and assisting Perhutani KPH Probolinggo in preventing and eradicating

illegal forest destruction. Efforts to prevent and eradicate forest destruction are carried out by Perhutani KPH Probolinggo through preventive and repressive measures. Preventive measures involve routine patrols and early detection, while repressive measures involve collaboration with local police and law enforcement.

Keywords: *PHBM, LMDH, Prevention, Eradication, Perhutani*

PENDAHULUAN

Sebagian besar kehidupan manusia sangat bergantung terhadap sumber daya hutan secara langsung maupun tidak langsung. Hutan berguna sebagai paru-paru dunia karena menghasilkan oksigen dan menyerap karbondioksida, yang keduanya diperlukan untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup, terutama manusia. Hutan juga dapat memberikan manfaat untuk pemeliharaan keanekaragaman hayati dan habitat, menghasilkan hasil kayu dan non kayu, perlindungan siklus air, maupun sebagai tempat wisata (Winata & Yuliana, 2012).

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo memiliki luas areal hutan 84.289,01 ha yang termasuk salah satu unit kelola sumber daya hutan (SDH) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Wilayah kerja KPH Probolinggo terdiri dari Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Situbondo. Menurut peruntukannya, wilayah hutan KPH Probolinggo terdiri dari 34193,52 ha Hutan Lindung dan Hutan Produksi terdiri dari: 1) Kawasan perlindungan 7.670,84 ha; 2) Kawasan klas perusahaan 10.347,43 ha; 3) Kawasan bukan klas perusahaan 21.576,23 ha; 4) Kawasan untuk penggunaan lain 10.500,99 ha (Perhutani, 2024).

Pada dasarnya, pihak Perhutani telah membuat prosedur perizinan pemanfaatan hutan untuk membantu kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Karena masalah ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, pemerintah perlu memperhatikan hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Roidah, 2018). Namun, faktanya bahwa beberapa pihak tertentu menyebabkan kerusakan hutan karena tidak menerapkan prosedur yang ada (Putri & Subekti, 2022).

Beberapa pihak menilai bahwa strategi peningkatan pembangunan hutan yang dipusatkan dan diawasi oleh negara tidak memadai untuk menjaga kawasan hutan dan hanya mengusahakan hasil hutan tanpa menghiraukan dampak sosialnya (Jatminingsih, 2009). Kegiatan perusakan lahan hutan antara lain pemanfaatan kawasan hutan secara melawan hukum, seperti penebangan, pemindahan dan penjualan kayu ilegal atau tanpa izin dari pemerintah setempat, serta pemusnahan, pengangkutan dan pengiriman flora dan fauna yang dilindungi undang-undang dari kawasan hutan tanpa izin. dari instansi yang bertanggung jawab di wilayah hutan tersebut.

Berdasarkan masalah tersebut, ketepatan kebijakan pembangunan kehutanan diperlukan agar keuntungan bisa diperoleh dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini mengakibatkan kurang adanya keterlibatan pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat yang merupakan bagian dari kehidupan mereka. Sehingga, masyarakat sudah seharusnya menjadi kunci utama dalam pengelolaan hutan. Oleh karena itu, program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) diterapkan pada masyarakat yang ada di sekitar hutan

sebagai pendekatan dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Perhutani dan petani desa hutan bekerja sama melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk mencapai kesepakatan antara kedua pihak dalam memanfaatkan hutan (Wijayati dkk, 2023).

Program PHBM adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan yang bekerja sama dengan Perhutani, masyarakat desa hutan, serta pihak yang berkepentingan lainnya (*stakeholder*). Tujuan program ini adalah untuk mengoptimalkan manfaat hasil sumber daya hutan untuk mencapai kepentingan bersama (Kristiono, 2014). Hal ini sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), sistem pengelolaan yang mengutamakan kolaborasi dan sinergi antara masyarakat sekitar hutan dan Perhutani (Anggiani & Hikmawan, 2022). Untuk mencapai hal tersebut dibentuklah lembaga masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengelola hubungan masyarakat sekitar hutan melalui kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu mengidentifikasi pelaksanaan program PHBM yang dilaksanakan oleh Perhutani KPH Probolinggo dengan masyarakat desa hutan dan mengidentifikasi upaya untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan oleh Perhutani KPH Probolinggo. Identifikasi tersebut penting karena dengan adanya program PHBM masyarakat terlibat dalam menjaga sumberdaya hutan serta membantu Perhutani KPH Probolinggo dalam mencegah dan memberantas perusakan hutan secara ilegal.

METODE

Penelitian dalam jurnal ini memakai metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan kemanusiaan di dunia nyata, yang berupa kata-kata dan memberikan penjelasan mendalam tentang sudut pandang narasumber (Fadli, 2021). Data primer dan data sekunder dikumpulkan dalam penelitian ini. Data primer berupa upaya mencegah dan memberantas perusakan hutan oleh Perhutani bersama masyarakat sekitar hutan melalui program PHBM. Sedangkan, data sekunder berupa artikel/jurnal terkait, dan web Perhutani.

Pengumpulan data menggunakan metode survei dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tujuan jurnal yang dibantu KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan) sebagai enumerator. Data diambil dari beberapa ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), KBKPH (Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan), dan KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan) berbentuk narasi yang didapatkan dari wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada KPH Probolinggo di kawasan hutan Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari empat BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) yaitu BKPH Probolinggo, BKPH Kraksaan, BKPH Sukapura, dan BKPH Bermi. Waktu pengambilan data dilakukan pada bulan Februari hingga Juni 2024, lalu dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program PHBM

Program PHBM adalah gagasan baru yang ditawarkan oleh Perhutani kepada masyarakat sekitar hutan dengan pembaharuan konsep dari pola sebelumnya sehingga manfaat hasil sumberdaya hutan dapat dioptimalkan untuk mencapai kepentingan bersama. PHBM ini tidak dapat berjalan tanpa kontribusi dari Perhutani dengan para petani hutan yang termasuk dalam anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program tersebut. Agar pengelolaan sumber daya hutan bekerja dengan baik maka keterlibatan aktif para pihak ini diperlukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Setiawan (2022) bahwa kelembagaan masyarakat petani hutan dapat diperkuat sebagai upaya dalam membantu memanfaatkan wilayah hutan guna menjaga kelestarian hutan dan keragaman hayati serta keamanan hutan.

Dalam menjaga kelestarian hutan dan menghasilkan hasil yang saling menguntungkan, maka pengelolaan sumber daya hutan dilaksanakan bersama dengan masyarakat (Wahanisa, 2015). Menurut Winata & Yuliana (2012) manfaat yang dihasilkan dari program tersebut antara lain : 1) pembagian yang adil terhadap hasil hutan dari Perhutani untuk meningkatkan pendapatan para petani hutan; 2) pengelolaan yang optimal terhadap kemampuan dan keunggulan aset lahan hutan; 3) keyakinan akan hak dalam mengelola lahan garapan dengan tujuan agar para petani bisa mengembangkan lahan garapan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perum Perhutani KPH Probolinggo melakukan program PHBM di kawasan hutan wilayah Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo. KPH Probolinggo melakukan kerjasama bersama dengan masyarakat sekitar hutan yang diberi wadah oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat melalui Perjanjian Kerjasama (PKS). Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah suatu perjanjian antara Perum Perhutani dengan lembaga atau organisasi masyarakat yang bertujuan untuk membantu menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. Hal tersebut dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia karena pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui pembangunan SDM sehingga masyarakat desa hutan disana dapat berpartisipasi aktif dalam proses membentuk dan mempengaruhi kehidupan mereka menjadi lebih baik (Harya, 2020).

PKS ini menjadi *Memorandum of Understanding* (MoU) yang digunakan oleh masyarakat sekitar hutan melalui lembaga masyarakat untuk menggunakan lahan Perhutani sebagai pengoptimalan lahan hutan. PKS sendiri menjadi dasar hukum yang digunakan oleh Perhutani terhadap perjanjian yang telah dilakukan bersama Lembaga Masyarakat. Dalam PKS terdapat perjanjian penggunaan lahan, jangka waktu penggunaan dan bagi hasil keuntungan. Ketentuan bagi hasil (*sharing*) dari perjanjian ini merupakan bagi hasil keuntungan (*profit sharing*) yang diperoleh dari hasil penjualan suatu komoditas setelah dikurangi PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Proporsi bagi hasil pemanenan pihak Perhutani sebesar 30% dan pihak LMDH sebesar 70%. PKS dari KPH Probolinggo banyak di dominasi dengan penanaman tanaman pertanian yang disebut sebagai sistem Agroforestri.

Agroforestri adalah sistem pemanfaatan lahan untuk mengoptimalkan kelestarian lingkungan serta mengkombinasikan tanaman pertanian dengan kehutanan (Helida *et al.*, 2021). Sistem agroforestri adalah sistem bercocok tanam multikultural yang menggabungkan tanaman pertanian dan kehutanan dalam satu lahan. Agroforestri memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat sekitar hutan yang mampu meningkatkan intensitas dan produktivitas panen sehingga memberikan tambahan perekonomian (Andriansyah *et al.*, 2019). Hal ini sesuai dengan pernyataan Salsabila dkk (2023) bahwa luas lahan pertanian semakin berkurang, maka dengan kombinasi tanaman pertanian dan kehutanan dapat mendorong pengembangan masyarakat (*Community Development*) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan lainnya.

Manfaat dari agroforestri bukan hanya memberikan keuntungan perekonomian, akan tetapi juga untuk lingkungan hidup yang meliputi mempertahankan fungsi hutan dalam membantu DAS (Daerah Aliran Sungai), menurunkan jumlah gas rumah kaca di atmosfer, serta mempertahankan keanekaragaman hayati (Widiyanto *dkk.*, 2003). Agroforestri sering disebut sebagai contoh dari "Sistem Pertanian Sehat" karena berfungsi untuk mempertahankan DAS dan mengurangi konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer melalui penyerapan gas karbondioksida dari atmosfer oleh tanaman dan diakumulasikan dalam bentuk biomasa tanaman.

Oleh karena itu, sistem PHBM dilaksanakan dengan rasa berbagi serta menguatkan. Hal ini mencakup bagaimana lahan digunakan, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk mengolahnya, serta hasil dari pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, mendukung, serta memperkuat. Selain itu, kerangka ini memperkuat kesadaran akan kewajiban sosial. Setelah enam tahun menerapkan PHBM, ditemukan beberapa kendala dan permasalahan. Oleh karena itu, PHBM PLUS dikembangkan pada tahun 2007 dari sistem ini.

Harapan adanya PHBM PLUS terhadap pengelolaan sumber daya hutan di Jawa akan menjadi fleksibel, akomodatif, terlibat, serta dengan kesadaran tanggung jawab sosial yang tinggi. Hal ini akan membantu bagi meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan membangun masyarakat desa hutan mandiri dan hutan lestari. Program PHBM ini juga dapat memberikan keuntungan bagi Perhutani sebab masyarakat sekitar hutan dapat berpartisipasi langsung dalam menjaga sumberdaya hutan serta membantu Perhutani KPH Probolinggo dalam mencegah dan memberantas perusakan hutan secara ilegal.

Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Oleh Perhutani Kph Probolinggo

Perusakan hutan di wilayah Perum Perhutani KPH Probolinggo masih banyak yang terjadi. Perum Perhutani KPH Probolinggo mengalami kerugian yang cukup besar akibat berbagai aktivitas ilegal dan bentuk eksploitasi lainnya yang mengarah ke hutan, yang seharusnya menjadi sumber kegiatan perekonomian dan penunjang ekosistem. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang dianggap menambah besarnya perusakan hutan yang terjadi di kawasan hutan KPH Probolinggo, antara lain:

- a. Faktor alam yang tidak dapat diprediksi serta cuaca yang tidak menentu di wilayah KPH Probolinggo.

- b. Minimnya kontribusi masyarakat di beberapa wilayah KPH Probolinggo dalam pengelolaan dan pelestarian hutan.
- c. Lahan yang mudah terbakar disebabkan oleh faktor cuaca panas yang ekstrim, sehingga dapat memperburuk kondisi hutan di wilayah KPH Probolinggo.

Menyadari banyaknya kelemahan di kawasan KPH Probolinggo yang berpotensi terjadinya perusakan maupun kerusakan hutan, oleh karena itu Perhutani perlu melakukan beberapa upaya guna mencegah dan memberantas perusakan maupun kerusakan hutan. Adapun upaya yang dilakukan, antara lain:

a. Upaya Pencegahan Perusakan Hutan Oleh Perhutani KPH Probolinggo

KPH Probolinggo melakukan upaya pencegahan perusakan hutan melalui komunikasi dengan masyarakat dan keterlibatan lembaga masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan. Administatur hingga mandor juga turut serta dalam cara-cara penanganan masyarakat setempat, misalnya pelatihan, pengarahan dan korespondensi yang bertujuan untuk memberikan pandangan dan sedikit pengetahuan tentang hutan, sehingga dapat meningkatkan aset hutan dan tidak mengabaikan pengelolaan maupun kelestarian hutan. Adapun pendekatannya dengan menyerap tenaga kerja, bagi hasil kayu, serta melakukan Kolaborasi.

1. Penyerapan Tenaga Kerja

Perhutani KPH Probolinggo menyerap tenaga kerja sebagai pekerja lapang seperti penyadap pohon pinus maupun damar, penebang kayu, pengangkut kayu, penimbun kayu, bahkan menjadi bagian dari perhutani yaitu Mandor.

2. Bagi Hasil Kayu

Perhutani KPH Probolinggo pada saat proses penebangan kayu di wilayah hutan tertentu juga berhubungan langsung dengan masyarakat setempat serta pembagian hasil kayu kepada masyarakat berupa ranting-ranting pohon yang digunakan sebagai kayu bakar.

3. Manajemen Kolaborasi (*Collaborative Management*)

Perhutani KPH Probolinggo melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak seperti lembaga desa, tokoh masyarakat serta LMDH. Bentuk kolaborasi ini berupa program PHBM melalui Perjanjian Kerjasama (PKS)

b. Upaya Pemberantasan Perusakan Hutan Oleh Perhutani KPH Probolinggo

Perum Perhutani KPH Probolinggo menerapkan dua jenis tindakan untuk mengupayakan dalam memberantas perusakan hutan, yakni tindakan preventif dan represif. Dua tindakan ini memiliki tujuan yang sama tetapi berbeda perlakuan, tindakan preventif menggunakan perlakuan dengan komunikasi untuk menjaga keamanan hutan, sedangkan tindakan represif menggunakan perlakuan tegas untuk mempertahankan keamanan hutan. Adapun penjelasannya yaitu:

1. Tindakan Preventif

Tujuan dari tindakan pencegahan ini adalah untuk mengurangi aktivitas masyarakat yang dapat mengancam keamanan hutan. KPH Probolinggo melaksanakan hal tersebut dengan berbagai cara, antara lain:

- Patroli Rutin
Patroli rutin digunakan guna mencegah kerusakan di wilayah hutan untuk membantu mendeteksi aktivitas yang kurang baik di kawasan hutan, seperti *illegal logging* ataupun kebakaran hutan secara dini, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cepat.
- Deteksi dini
Deteksi dini ini adalah perlakuan yang utama dikarenakan petugas keamanan perlu mengetahui titik letak lokasi yang rawan. Tindakan ini dilakukan dengan agar dapat mengantisipasi dini dari terjadinya gangguan hutan.
Karena petugas keamanan perlu mengetahui lokasi yang rawan, deteksi dini ini sangat penting.

2. Tindakan Represif

Melalui optimalisasi penegakan hukum dalam penyelesaian perkara, tindakan represif ini bertujuan untuk mempertahankan eksistensi sumber daya hutan yang masih ada, baik secara mandiri atau bekerja sama dengan kepolisian, instansi terkait, hingga masyarakat. KPH Probolinggo melaksanakan hal tersebut dengan berbagai cara, antara lain:

- Koordinasi dengan Pihak Kepolisian
Koordinasi ini berlangsung secara situasional sebagai bentuk pengamanan untuk menyelamatkan hutan.
- Penegakan Hukum
Peningkatan ini ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga mereka tidak melakukan kesalahan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan lagi.

Hambatan Perhutani KPH Probolinggo dalam Pengupayaan Pencegahan Perusakan Hutan

Perum Perhutani KPH Probolinggo mengakui bahwa setelah program PHBM dilaksanakan untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan di wilayahnya, masih ada beberapa kendala yang harus ditangani. Hambatan tersebut dapat disebabkan oleh kondisi masyarakat desa hutan, LMDH hingga pihak perhutani sendiri berkontribusi dalam hambatan tersebut. Berikut ini beberapa hambatan yang dialami adalah:

- a. Kurangnya pembinaan dari LMDH untuk mendorong masyarakat desa hutan di wilayah Perhutani KPH Probolinggo untuk mengelola dan memanfaatkan hutan. Akibatnya, kesadaran masyarakat desa hutan kurang akan pentingnya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hutan.
- b. Karena terbatasnya luas lahan dibandingkan dengan jumlah masyarakat desa hutan, maka kebutuhan masyarakat tersebut tidak dapat dipenuhi. Akibatnya, masyarakat di sekitar hutan sangat membutuhkan lahan.
- c. Karena LMDH masih kekurangan keahlian dalam pembinaan dan pengelolaan koperasi, maka koperasi milik Perhutani saat ini sudah tidak aktif.
- d. LMDH tidak dapat mengelola usaha produktifnya secara efektif karena kurangnya sarana dan prasarana.

- e. Sejumlah LMDH yang mendapat bagian dari produksi kayu seperti kayu bakar, belum mampu memanfaatkan hasilnya secara maksimal untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
- f. Minimnya SDM di Perhutani KPH Probolinggo yang akan segera pensiun memperparah disparitas jumlah anggota tim pengamanan hutan dan luas hutan.
- g. Mandor pengamanan hutan yang kurang fokus saat melakukan patroli dikarenakan sering merangkap pekerjaan lain serta tim patroli yang belum sepenuhnya menguasai ilmu yang didapat.

SIMPULAN

Program PHBM merupakan inisiatif Perhutani untuk meningkatkan manfaat dari hasil sumber daya hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan melalui LMDH. Dengan kerjasama ini tercipta pembagian hasil secara adil, sekaligus memberikan kepastian hak pada petani hutan dalam mengelola lahan garapan mereka, program juga menguntungkan dari segi ekonomi dan kelestarian lingkungan hutan. Upaya Perhutani KPH Probolinggo melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif melibatkan patroli rutin dan deteksi dini, sedangkan tindakan represif melibatkan kerjasama dengan polisi dan penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, R., Hidayah, A. K., Tirkaamiana, M. T. (2019). *Studi Tentang Pemanfaatan Lahan Dengan Pola Agroforestry Pada Kebun Belimbing Di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Sebrang Rahmat*. 1–15.
- Anggiani, P., & Hikmawan, M. D. (2022). Dinamika Kemitraan Antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Pulo Cangkir Kabupaten Tangerang. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 4(2), 112–127. <https://doi.org/10.24076/jspg.v4i2.936>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Harya, G. I. (2020). Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan Dan Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 20(2), 48–66. <https://doi.org/10.30742/jisa20220201223>
- Helida, A., Yayat, H., Okta, S. S., & Sasua, H. S. (2021). Analisis Pendapatan Sistem Agroforestri Di Iuphkh-Hti Pt. Sumatera Alam Anugerah Kecamatan Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *SYLVA: Jurnal Penelitian Ilmu Kehutanan*, 15018, 1–23.
- Jatminingsih, T. (2009). *Karakteristik Lingkungan, Karakteristik Petani Pesanggem, dan Peran Masyarakat Lokal dalam PHBM KPH Kendal*. Tugas Akhir. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota; Semarang: Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Kristiono, B. (2014). *Program PHBM di Sekitar Kawasan Konversi. Layakkah Dipertahankan???* (Studi Kasus di Kawasan TN Alas Purwo).
- Perhutani. (2024). *KPH Probolinggo*.
- Putri, B. S., & Subekti, R. (2022). Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Mantingan. *Jurnal*

- Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 7(1), 328–335.
- Roidah, I. S. (2018). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita*, 4(1), 39–47. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- Salsabila, A. A., Sari, A. D. A., Kusumawati, B., Atasa, D., Yuliati, N., Suryani, D., & Ardiansyah, R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Agroeduwisata di Mulyaharja, Bogor, Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 361–366. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- Setiawan, R. F. (2022). Kemiskinan Dan Kesejahteraan Dalam Kaitannya Pada Pembangunan Pertanian. *Berkala Ilmiah AGRIDEVINA*, 11(1), 57–68. <https://doi.org/10.33005/adv.v11i1.3095>
- Wahanisa, R. (2015). Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). *Model Pengendalian Hutan Bersama Masyarakat*, 4(2), 416–438.
- Widianto, Hairiah, K., Suharjito, D., & Sardjono, M. A. (2003). Fungsi dan Peran Agroforestri. *World Agroforestry Centre (ICRAF)*, 3(Bagian 1), 1–49.
- Wijayati, P. D., Widayanti, S., Setyadi, T., Rizkiyah, N., & Roidah, I. S. (2023). Inovasi On Farm Untuk Peningkatan Pendapatan Petani Kopi Kabupaten Jember Jawa Timur. *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 67–73.
- Winata, A., & Yuliana, E. (2012). Tingkat Partisipasi Petani Hutan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 28(1), 65–76. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i1.340>